



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA
BERENCANA TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan No 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan serta peraturan-peraturan terkait lainnya. Laporan Akuntabilitas merupakan kewajiban Organisasi Perangkat Daerah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan melaporkan kegiatan dan pencapaian program kepada pimpinan dalam rangka penilaian kinerjanya. Laporan ini menggambarkan Kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dalam rangka mencapai sasaran Rencana Strategi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana tahun 2022-2024.

Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana ini tidak terlepas dari hasil kerja keras dan kerja cerdas seluruh pegawai, unit-unit lintas program dan lintas sektor terkait.

Ucapan terima kasih kami sampaikan pada semua pihak yang telah mendukung seluruh kegiatan di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana tahun 2022. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberikan informasi, evaluasi, dan masukan bagi pengembangan perencanaan masa yang akan datang.

Sampang, 28 Februari 2023
Kepala Dinas Kesehatan dan KB
Kabupaten Sampang

Dr. ABDULLOH NAJICH, Sp.P., MM.

Pembina

NIP. 19750421 200604 1 012

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	1
: A. Struktur Organisasi	I-2
: B. Tugas dan Fungsi	I-3
: C. Isu Strategis	I-25
: D. Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD)	I-26
: E. Peta Proses Bisnis	I-51
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	II-1
: A. Rencana Strategis	II-1
: B. Perjanjian Kinerja	II-5
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
: A. Capaian Kinerja	III-1
: B. Realisasi Anggaran	III-12
BAB 4 : PENUTUP	IV-1

BAB I PENDAHULUAN

Pembangunan bidang kesehatan menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Selaras dengan tujuan tersebut maka daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan kesehatan yang ada di daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing daerah. Di Kabupaten Sampang, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagai satu lembaga yang ada di daerah, maka wajib menyelenggarakan pembangunan kesehatan tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat terwujud.

Untuk melaksanakan pembangunan tersebut Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah (SKD) yang disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Sampang telah ditetapkan ada 7 (tujuh) subsistem bidang kesehatan yaitu: 1) Upaya Kesehatan, 2) Pemberdayaan Masyarakat, 3) Sumber Daya Manusia Kesehatan, 4) Pembiayaan Kesehatan, 5) Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan Makanan, 6) Manajemen, Regulasi dan Informasi Kesehatan, 7) Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Implementasi dari Sistem Kesehatan Daerah ini tertuang dalam rencana strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana berupa program dan kegiatan dengan indikator

kinerja yang terukur. Secara rutin tahunan hasil capaian kinerja tersebut akan dilakukan evaluasi dalam bentuk laporan kinerja.

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib kesehatan di Kabupaten Sampang mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan apakah telah memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022.

A. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang mengacu kepada Peraturan Bupati Sampang No. 6 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang.

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang antara lain:

- 1) KEPALA DINAS
 - 2) SEKRETARIS, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Kelompok jabatan fungsional
 - 3) BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT, membawahi kelompok jabatan fungsional
 - 4) BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR, membawahi kelompok jabatan fungsional
 - 5) BIDANG PELAYANAN KESEHATAN Dan SUMBER DAYA KESEHATAN, membawahi kelompok jabatan fungsional
 - 6) BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, membawahi kelompok jabatan fungsional
 - 7) UOBK DINAS
 - 8) UPTD DINAS
-

Gambar 1
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang



B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 6 Tahun 2022 Tanggal 7 Januari 2022 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Sampang dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Kesehatan dan tugas pembantuan. Sedangkan fungsi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang yaitu:

- perumusan kebijakan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- pelaksanaan administrasi dinas bidang kesehatan, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tugas dan fungsi setiap struktur dalam organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan pelayanan administrasi umum;
 - b. pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - e. pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
 - f. pembinaan organisasi dan tatalaksana dinas;
 - g. pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
 - h. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
 - i. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
 - j. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - k. pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya;
 - l. pelaksanaan administrasi dan pengelolaan keuangan
 - m. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
-

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sekretaris dibantu oleh:

1. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
 - b. melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - c. melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
 - d. menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
 - f. membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
 - g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
 - b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
 - b. melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
 - c. melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
 - d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan operasional peningkatan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, serta kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
 - b. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan bidang peningkatan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, serta kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
 - c. pelaksanaan kebijakan operasional bidang peningkatan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, serta kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
 - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang peningkatan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, lingkungan, serta kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang peningkatan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, serta kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang peningkatan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, serta kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
 - g. pelaksanaan administrasi Bidang Kesehatan Masyarakat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
-

3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan operasional bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan operasional bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - e. pelaksanaan administrasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
-

3. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan Kesehatan dan sumber daya kesehatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan operasional bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan operasional bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- f. pelaksanaan administrasi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

C. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi yang perlu diperhatikan berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal daerah Kabupaten Sampang. Analisis isu-isu strategis didefinisikan berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan serta disusun berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancaman.

Hasil analisa isu strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang seperti yang tertuang didalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang Tahun 2022-2024 yang membutuhkan pemecahan dan penanganan segera di lingkup Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang antara lain:

- a. Masih tingginya Angka Kematian Ibu
- b. Masih cukup tingginya angka kematian bayi
- c. Masih banyaknya kasus balita gizi buruk
- d. Meningkatnya prevalensi kusta
- e. Semakin banyaknya Angka Notifikasi Kasus pada TBC
- f. Insidence Rate penyakit DBD yang tinggi
- g. Prevalensi Hipertensi yang masih tinggi
- h. Prevalensi Diabetes Melitus semakin banyak
- i. Kasus kondisi gagal tumbuh pada anak balita (*stunting*) masih cukup tinggi
- j. SDM Kesehatan yang belum sesuai standart
- k. Keterbatasan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan

D. Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD)

Berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang selanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran, penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

Tabel. 1 Cascading

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia harapan hidup	1. Menurunnya angka kematian ibu dan bayi	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Persentase Fasilitas Kesehatan yang Melaksanakan UKP dan UKM	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan ibu hamil sesuai standar
				2. Angka Kematian Bayi (AKB)		2. Persentase pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Persentase RS Daerah yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan tingkat Kabupaten	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan	Jumlah ibu melahirkan yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu melahirkan sesuai standar
						3. Persentase Pelayanan ibu melahirkan			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi sesuai standar
						4. Persentase Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
						5. Persentase Pelayanan Kesehatan Balita			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						6. Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
						7. Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia	Jumlah penduduk lansia yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
						8. Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar
						9. Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan DM sesuai standar
						10. Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan	Jumlah orang dengan risiko HIV yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	
						11. Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan gangguan Jiwa (ODGJ) Berat			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah frekuensi pelayanan promosi kesehatan
						12. Persentase Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah pelaksanaan surveilans kesehatan
						13. Persentase pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah desa/kelurahan yang sudah ODF
			2. Meningkatnya status gizi masyarakat	1. Persentase Balita Stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Persentase Fasilitas Kesehatan yang Melaksanakan UKP dan UKM	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah balita stunting yang mendapatkan pelayanan gizi sesuai standar

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						2. Persentase pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Persentase RS Daerah yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan tingkat Kabupaten	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah sasaran yang diukur kebugarannya sesuai standar
						3. Persentase Pelayanan ibu melahirkan				
						4. Persentase Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir				
						5. Persentase Pelayanan Kesehatan Balita				
						6. Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				
						7. Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				
						8. Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia				
						9. Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						10. Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				
						11. Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan gangguan Jiwa (ODGJ) Berat				
						12. Persentase Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis				
						13. Persentase pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)				
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu berstatus Purnama dan Mandiri	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah frekuensi Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah frekuensi Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
							Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah posyandu berstatus purnama dan mandiri
			3. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	1. Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Persentase Fasilitas Kesehatan yang Melaksanakan UKP dan UKM	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
				2. Persentase RS Daerah Terakreditasi		2. Jumlah kasus Covid-19 yang ditangani			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah pasien suspek TBC yang mendapatkan pemeriksaan TB sesuai standar

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3. Angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) semua kasus TBC		3. Persentase sasaran penduduk yang telah divaksinasi Covid-19			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
				4. Angka prevalensi kusta		4. Persentase pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional dan akupuntur
				5. Angka prevalensi Covid-19		5. Persentase Pelayanan ibu melahirkan			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah frekuensi pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA
						6. Persentase Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir			Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah upaya kesehatan khusus yang dikelola
						7. Persentase Pelayanan Kesehatan Balita			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kasus DBD yang ditangani sesuai standar

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						8. Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan
						9. Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah pengambilan dan pengiriman spesimen potensial KLB ke laboratorium rujukan
						10. Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Tatanan Kabupaten/Kota Sehat yang dilakukan
						11. Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah penelitian kesehatan yang dikelola
						12. Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah penyediaan operasional pelayanan RS
						13. Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan gangguan Jiwa (ODGJ) Berat			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah penyediaan operasional pelayanan Puskesmas
						14. Persentase Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah penyediaan operasional pelayanan faskes lainnya

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						15. Persentase pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan reakreditasi Puskesmas
									Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah penyediaan operasional SPGDT/PSC 119
							Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah profil kesehatan kabupaten yang disusun
									Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah sistem informasi kesehatan yang dikelola
									Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah paket perangkat SIK dan jaringan internet yang dibeli

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan dan pembinaan tata kelola RS yang dilakukan
									Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah RS Daerah yang terakreditasi
					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang Memenuhi Standar	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik aktif
									Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap izin praktik tenaga kesehatan yang dilakukan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen rencana kebutuhan (renbut) SDM Kesehatan yang disusun
									Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Puskesmas dan RS yang memiliki SDM Kesehatan sesuai standar
									Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan yang dilakukan
							Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi teknis

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah apotek, toko obat, toko alkes, optik, dan UMOT yang memiliki izin aktif
						Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan yang Memenuhi Standar	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah	Jumlah PIRT yang memiliki sertifikat dan izin produksi aktif

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Tangga	
						Persentase PIRT yang Memiliki Ijin	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memiliki sertifikat laik higiene sanitasi
			4. Meningkatnya kepuasan masyarakat di bidang kesehatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang disusun

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun
									Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan yang disusun
									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan
									Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi BMD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBU yang disusun
									Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diberi label dan dicatat
									Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pembinaan dan pengawasan BMD yang dilakukan
									Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan BMD yang disusun
							Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi pendapatan daerah	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen rencana PAD yang disusun
									Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan penerimaan PAD yang disusun
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi kepegawaian	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah paket sarana dan prasarana disiplin pegawai yang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										dibeli
									Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya yang dibeli
									Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pengelolaan administrasi kepegawaian
									Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang dikelola
									Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah monev dan penilaian kinerja pegawai yang dilakukan
									Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mendapatkan diklat pegawai
									Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang dibeli
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang dibeli
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan ATK
									Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah langganan media cetak
									Penyediaan Bahan/Material	Jumlah penyediaan bahan habis pakai perkantoran
									Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang diselenggarakan
									Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah paket pengadaan penunjang SPBE
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD penunjang urusan pemerintahan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan
									Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang dibeli
									Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket peralatan dan mesin lainnya yang dibeli
									Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dibangun
									Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket sarana dan prasarana gedung kantor yang dibeli

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik
									Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar pajaknya
									Pemeliharaan Mebel	Jumlah paket mebel yang dipelihara

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara
							Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase penyediaan pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah penyediaan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD
2	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	1. Terkendalnya angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)	1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Kebijakan Pemerintah Kabupaten yang diselaraskan dengan Kebijakan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen GDPK yang disusun dan dimanfaatkan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan yang dilakukan
									Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah sarasehan hasil pemutakhiran data keluarga yang dilakukan
									Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah rapat pengendalian program KKBPK
							Persentase Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Kabupaten yang dipetakan		Pemetaan Kependudukan	Jumlah dokumen pemetaan kependudukan yang disusun
									Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem	Jumlah pembinaan dan pengawasan sistem

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Informasi Keluarga	informasi keluarga yang dilakukan
									Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah dokumen laporan hasil pemutakhiran data keluarga yang disusun
									Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah dokumen data dan informasi keluarga yang disusun
									Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah pencatatan dan pengumpulan data keluarga yang dilakukan
									Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah laporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB yang disusun
					PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi (CPR) Semua Metode	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah frekuensi advokasi KKBPK kepada stakeholder dan mitra kerja

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Lokal		
									Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah frekuensi KIE program KKBPK sesuai kearifan lokal yang dilakukan
									Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah paket sarana KIE program KKBPK yang diadakan dan didistribusikan
									Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah frekuensi promosi dan KIE program KKBPK melalui media

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah frekuensi rakorcam, rekordes, dan mminilok yang dilakukan
									Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah penyediaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK
									Pengendalian Program KKBPK	Jumlah frekuensi pengendalian program KKBPK
							Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase tenaga PKB/PLBK yang didayagunakan	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah frekuensi pembinaan IMP dan program KKBPK di lini lapangan yang dilakukan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah paket sarana pendukung operasional PKN/PLKB yang disediakan
									Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPk untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah frekuensi penyuluhan, penggerakan, pelayanan, dan pengembangan program KKBPk
									Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah frekuensi penggerakan IMP
							Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah	Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah paket alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan yang didistribusikan ke faskes

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten	Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
									Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah frekuensi peningkatan kesertaan penggunaan MKJP
									Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah dokumen rencana kebutuhan alokasi dan sarana penunjang pelayanan KB yang disusun
									Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah paket sarana penunjang pelayanan KB yang disediakan
									Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah frekuensi pembinaan pasca pelayanan bagi peserta KB yang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										dilakukan
									Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah frekuensi pembinaan pelayanan KB dan Kespro di faskes
									Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah frekuensi promosi dan konseling kespro yang dilakukan di faskes dan kelompok kegiatan
									Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah tenaga pelayanan KB yang mendapatkan peningkatan kompetensi

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah penyediaan dukungan operasional pelayanan KB bergerak
									Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah frekuensi peningkatan kesertaan KB Pria yang dilakukan
							Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah frekuensi koordinasi integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB
									Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah frekuensi pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB
									Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah frekuensi pembinaan terpadu kampung KB yang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										dilakukan
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Baduta Stunting	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibentuk

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah paket sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang diadakan
									Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapatkan pelatihan teknis/orientasi

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaa n Ekonomi Keluarga/UPP KS)	Jumlah penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana ketahan dan kesejahteraan keluarga
									Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaa n Ekonomi Keluarga/UPP KS)	Jumlah penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah frekuensi promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
									Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah frekuensi Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
									Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah dokumen materi IPK yang disusun

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah frekuensi advokasi dan promosi IPK
									Sosialisasi IPK	Jumlah frekuensi sosialisasi IPK
									Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Jumlah frekuensi koordinasi evaluasi pencapaian IPK
							Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,	Jumlah Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang disusun

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah frekuensi Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
									Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	Jumlah frekuensi pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)	BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)
									Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah frekuensi Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

E. Peta Proses Bisnis

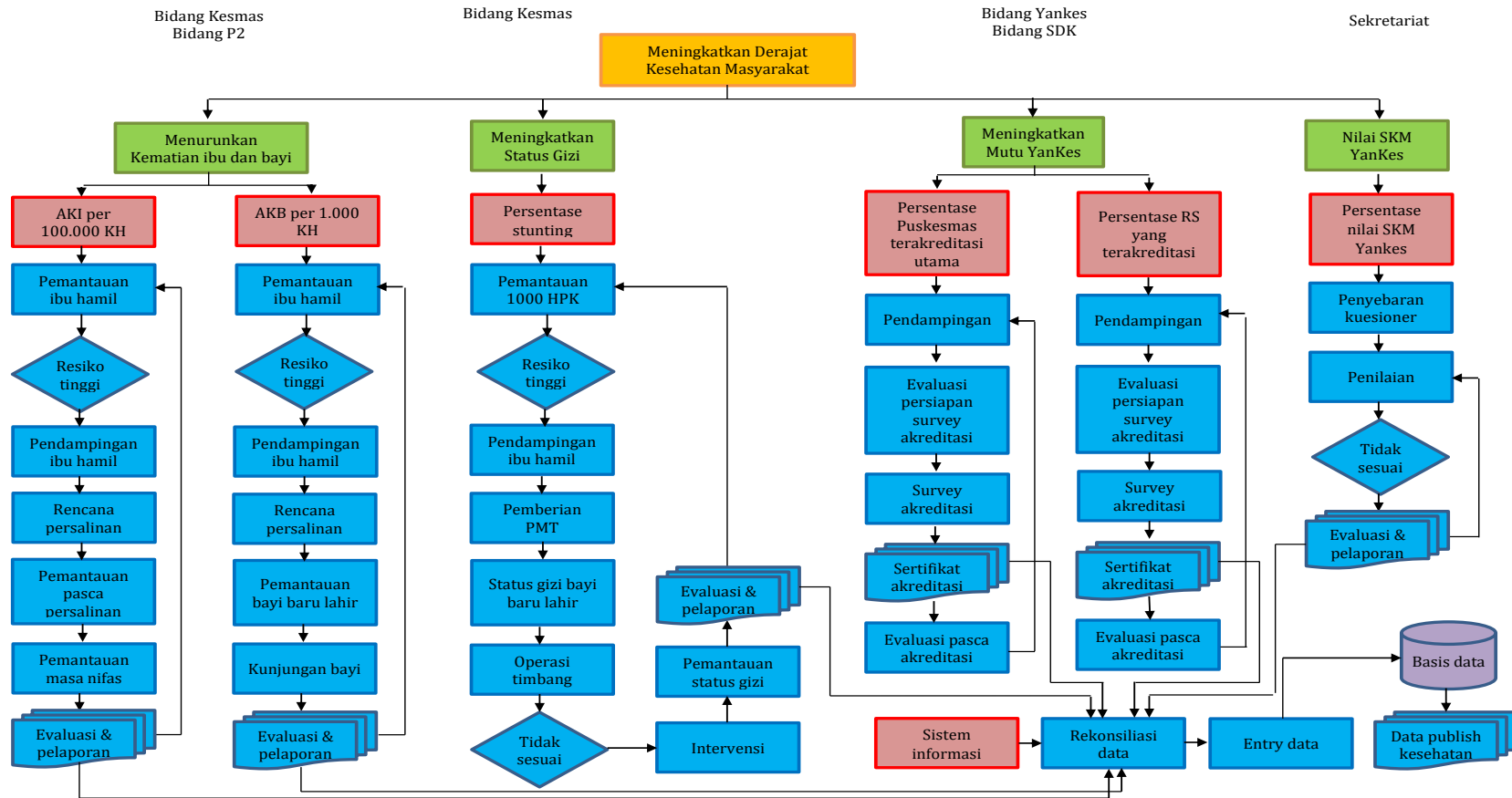
Dokumen Cascading selanjutnya dibandingkan dengan peta proses bisnis. Proses Bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi/level untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing–masing instansi pemerintah. Peta proses bisnis harus menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis sendiri merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan. Berikut Peta Proses Bisnis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang :

PETA BISNIS DINAS KESEHATAN



F. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2022 nomor : 700/457.1/434.100/2022 tanggal 04 Nopember 2022, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Pada penilaian implementasi renstra terdapat kontrol logis dimana tidak boleh lebih dari nilai rata-rata indicator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indicator kinerja yang baik.

B. Pengukuran Kinerja

B.II Kualitas Pengukuran

Kualitas pengukuran kinerja telah memenuhi kriteria namun pengumpulan data kinerja atas rencana aksi belum konsisten dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester) dan pengukuran kinerja belum ada pengumpulan data kinerja

B.III Implementasi Kinerja

17) Tidak semua target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya setiap bulan, karena:

- a. belum terdapat dokumentasi hasil monitoring
- b. belum terdokumentasi hasil tindaklanjut atas hasil monitoring

19) Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian rewards and punishment)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang merupakan suatu perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana yang mengedepankan isu-isu lokal dan merupakan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan anggaran pembiayaan yang ada.

Dalam menyusun perencanaan kinerja yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang mengikuti dan memperhatikan sasaran strategis dan indikator kinerja serta target yang telah ada di dalam Rencana Strategis.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang Tahun 2022 – 2024 ini berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 – 2024.

Keselarasan Renstra Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2022 – 2024 terkait dalam Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dan Misi 2: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah dan Perdesaan melalui Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang Tahun 2022-2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

Dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah, dirumuskan suatu bentuk yang lebih terarah yaitu berupa tujuan dan sasaran di setiap perangkat daerah. Tujuan dan sasaran akan menjadi dasar penyusunan kinerja selama lima tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan yaitu berupa *result* (hasil) yang ingin dicapai dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Berikut ini tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang:

Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Sasaran:

Sasaran 1 : Menurunnya Kematian Ibu dan bayi

Sasaran 2 : Meningkatnya Status Gizi

Sasaran 3 : Menurunnya Angka Kesakitan

Sasaran 4 : Nilai SKM Pelayanan Kesehatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka didukung Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Menurunnya Kematian Ibu dan Bayi

Indikator : Angka Kematian Ibu

Program :

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan :

- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota

Sasaran 2 : Meningkatnya Status Gizi

Indikator : Prevalensi stunting

Program :

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
-

- Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

Kegiatan :

- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
- Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran 3 : Menurunnya Angka Kesakitan

- Indikator :
1. Angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) semua kasus TBC
 2. Prevalensi kusta
 3. Prevalensi hipertensi

Program :

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan :

- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran 4 Meningkatkan SKM Pelayanan Kesehatan

- Indikator : Persentase nilai SKM Kesehatan

Program :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
-

- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tujuan II : Pengendalian jumlah penduduk

Sasaran:

Sasaran 1 : *Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk melalui pelayanan keluarga berencana*

Indikator : Total Fertility Rate

Program :

- Program Pengendalian penduduk
- Program Pembinaan Keluarga Berencana
- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Kegiatan :

- Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
-

- Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
- Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang.

Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan antar atasan dan bawahan menjadi kesepakatan yang mengikat untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai upaya mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkualitas. Perjanjian penetapan kinerja sesuai dengan dokumen penetapan kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Tahun 2022 yang telah ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana. Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022
1	Menurunnya Kematian Ibu dan Bayi	1 Angka Kematian Ibu	73/100.000 kelahiran hidup
		2 Angka Kematian Bayi	5,4/1.000 kelahiran hidup
2	Meningkatnya Status Gizi	3 Persentase Stunting	10%
3	Menurunnya Angka kesakitan	Angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) semua kasus TBC	88%
		5 Prevalensi kusta	2/10.000 penduduk
		6 Prevalensi hipertensi	33%
4	Nilai SKM Pelayanan Kesehatan	7 Persentase Nilai SKM Pelayanan Kesehatan	85%
5	Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk melalui pelayanan keluarga berencana	8 Total fertility rate	1,9%

Dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tabel 2.1 diatas, didukung oleh anggaran sebesar Rp. 233.141.576.149,-

Adapun anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 8 Program, 22 kegiatan dan 135 subkegiatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang Tahun 2022

NO	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	82.420.523.037,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140.467.233,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	93.342.233,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.000.000,00

NO	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.300.000,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.425.000,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.675.000,00
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.725.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80.619.953.054,00
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	80.611.901.413,00
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.065.547,00
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.986.094,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	494.066.792,00
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.303.380,00
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.839.107,00
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95.842.605,00
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	94.137.800,00
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.680.000,00
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	212.263.900,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	278.042.658,00
16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.000.000,00
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	158.042.658,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	512.243.300,00
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.275.000,00
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	258.468.300,00
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	252.500.000,00

NO	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	375.750.000,00
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	178.000.000,00
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.800.000,00
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	121.950.000,00
B	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	134.760.530.360,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	17.930.743.567,00
24	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	718.256.220,00
25	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-
26	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.287.658.737,00
27	Pengadaan Obat, Vaksin	7.090.667.863,00
28	Pengadaan Bahan Habis Pakai	3.679.995.403,00
29	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	154.165.344,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	116.329.993.128,00
30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.567.433.639,00
31	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.097.299.422,00
32	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	45.589.424,00
33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	304.433.035,00
34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	546.157.514,00
35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	45.991.284,00
36	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	238.600.245,00

NO	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
37	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	43.262.500,00
38	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	13.077.500,00
39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	166.575.340,00
40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	291.984.230,00
41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	146.324.279,00
42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	5.520.419.754,00
43	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.569.855.826,00
44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	496.936.784,00
45	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	827.050.464,00
46	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.081.430.231,00
47	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	619.852.863,00
48	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	233.502.278,00
49	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3.297.653.440,00
50	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	75.391.292.197,00
51	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	224.437.846,00
52	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	426.480.000,00
53	Operasional Pelayanan Puskesmas	18.875.855.858,00
54	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	208.343.516,00
55	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	561.831.696,00
56	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	488.321.963,00
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	499.793.665,00
57	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	329.329.165,00
58	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	133.301.000,00

NO	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
59	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	37.163.500,00
C	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	4.639.426.200,00
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	24.998.763,00
60	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	24.998.763,00
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	4.614.427.437,00
61	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	4.562.637.000,00
62	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	51.790.437,00
D	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	268.290.509,00
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	137.639.126,00
63	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	137.639.126,00
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	21.736.383,00
64	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	21.736.383,00
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	108.915.000,00
65	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	108.915.000,00

NO	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
E	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.137.094.370,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	760.674.879,00
66	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	760.674.879,00
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	472.515.774,00
67	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	472.515.774,00
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	903.903.717,00
68	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	903.903.717,00
F	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	147.199.751,00
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	147.199.751,00
69	Perumusan Parameter Kependudukan	14.999.751,00
70	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	5.000.000,00
71	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	127.200.000,00
G	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.617.489.280,00
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	922.973.040,00
72	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.374.654,00
73	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000,00
74	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	70.636.000,00
75	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	215.998.896,00

NO	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
76	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	566.989.000,00
77	Pengendalian Program KKBPK	39.974.490,00
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.004.533.008,00
78	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	536.400.000,00
79	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	892.800.000,00
80	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	21.634.463,00
81	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	406.633.540,00
82	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	100.766.000,00
83	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	9.576.616,00
84	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	28.184.982,00
85	Peningkatan Kesertaan KB Pria	8.537.407,00
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	689.983.232,00
86	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	689.983.232,00
H	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.151.022.642,00
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5.151.022.642,00
87	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UppKS)	513.000.000,00

NO	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
88	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	53.419.940,00
89	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4.469.480.000,00
90	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	15.157.000,00
91	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	99.965.702,00
	JUMLAH TOTAL	233.141.576.149,00

Sumber: DPA Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Sistem pengukuran kinerja merupakan suatu hal penting dalam pelaksanaan *good governance* untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam pencapaian kinerja organisasi. Pengukuran kinerja berhubungan dengan evaluasi program seperti audit kinerja, perencanaan strategis dan analisis kebijakan. Sampai sejauh ini pengukuran kinerja sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program di masing-masing organisasi perangkat daerah.

Akuntabilitas Kinerja diukur dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Formulir Capaian Indikator Kinerja Utama yang telah terisi, dilakukan verifikasi data internal guna menjaga keakuratan data tersebut. Sedangkan tanggung jawab pengumpulan data kinerja merupakan kewenangan masing-masing bidang di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang.

Adapun penanggung jawab data kinerja tiap-tiap Indikator Kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1 Penanggung Jawab Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	PJ
1	Menurunnya Kematian Ibu dan Bayi	1 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Bidang Kesehatan Masyarakat
		2 Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	
2	Meningkatnya Status Gizi	3 Persentase Stunting	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	PJ
3	Menurunnya angka kesakitan	4 Angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) semua kasus TBC	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		5 Prevalensi kusta	
		6 Prevalensi hipertensi	
4	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	7 % SKM Pelayanan Kesehatan	Sekretariat
5	Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk melalui pelayanan keluarga berencana	8 Total fertility rate	

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Pengukuran kinerja meliputi perjanjian kinerja dan pengukuran indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran dalam mewujudkan misi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dan pengukuran kinerja dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang, ditetapkan penilaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

85 Ke Atas	: Sangat Berhasil
$70 \leq X < 85$: Berhasil
$55 \leq X < 70$: Cukup Berhasil
$X < 55$: Kurang Berhasil

1. Capaian kinerja dibandingkan dengan target sasaran

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, perubahan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Tahun 2022

Tujuan: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian
1	Menurunnya Kematian Ibu dan Bayi	1 Angka Kematian Ibu	73/100.000 kelahiran hidup	74,68/100.000 kelahiran hidup	97,75
		2 Angka Kematian Bayi	5,4/1.000 kelahiran hidup	3,36/1.000 kelahiran hidup	160,71
2	Meningkatnya Status Gizi	3 Prevalensi Stunting	10%	4,61%	216,92
3	Menurunnya Angka Kesakitan	4 Angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) semua kasus TBC	88%	83,73%	95,15
		5 Prevalensi kusta	2/10.000 penduduk	2,46/10.000 penduduk	81,30
		6 Prevalensi hipertensi	33%	36,9%	89,43
4	Nilai SKM Pelayanan Kesehatan	7 Persentase Nilai SKM Pelayanan Kesehatan	86%	86,25%	100,29
5	Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk melalui pelayanan keluarga berencana	8 Total fertility rate	1,9	2,42	78,51

- a. Sasaran Menurunnya Kematian Ibu dan Bayi pada indikator angka kematian ibu kinerjanya mencapai 97,75% atau kategori **SANGAT BERHASIL**. Untuk mencapai keberhasilan sasaran strategis ini didukung oleh Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan sasaran ini adalah: kompetensi petugas yang bagus dalam memberikan

pelayanan bagi ibu hamil dan ibu nifas. Selain itu juga kepatuhan petugas dalam melakukan seluruh screening ibu hamil yaitu pemeriksaan ibu hamil dengan 10T. Melalui tahapan screening ini sejak dini sudah terdeteksi kondisi kehamilan ibu. Apabila ibu hendak bersalin dan tidak termasuk dalam penapisan, maka ibu akan segera di rujuk ke FKTL. Adanya kebijakan persalinan harus di fasilitas kesehatan juga berkontribusi besar dalam menurunkan angka kematian ibu.

- b. Sasaran Menurunnya Kematian Ibu dan Bayi pada indikator angka kematian bayi kinerjanya mencapai 160,71% atau kategori **SANGAT BERHASIL**. Keberhasilan kinerja sasaran strategis ini didukung oleh Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Adanya kebijakan persalinan harus di fasilitas kesehatan juga berkontribusi besar dalam menurunkan angka kematian bayi, dikarenakan apabila ibu bersalin di fasilitas kesehatan, maka yang melayani persalinan bukan satu orang petugas kesehatan, tetapi oleh Tim VK FKTP serta dengan peralatan yang lengkap, sehingga ibu dan bayi akan ditangani sesuai dengan prosedur. Selain itu juga faktor keberhasilan pada indikator ini adalah keberhasilan kemitraan bidan dukun, sehingga dukun tidak menolong persalinan, tetapi hanya melakukan perawatan ibu bersalin dan perawatan bayi.
 - c. Sasaran meningkatnya status gizi dengan indikator persentase balita stunting capaian kinerja sebesar 216,92% atau kategori **SANGAT BERHASIL**. Keberhasilan kinerja sasaran strategis tersebut didukung oleh Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan pada indikator ini, diantaranya ialah pemantauan ibu hamil sejak 1000 hari kehidupan dengan memantau status gizi ibu hamil dengan rutin,
-

mulai dari pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil, pemenuhan gizi seimbang bagi ibu hamil, serta pemberian informasi tentang gizi bagi ibu hamil dan bayi.

- d. Sasaran strategis Menurunnya Angka Kesakitan pada indikator kinerja Angka keberhasilan pengobatan (*Success Rate*) semua kasus TBC dengan capaian kinerja sebesar 95,15% atau kategori **SANGAT BERHASIL**. Keberhasilan kinerja sasaran strategis tersebut didukung oleh Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Hal yang mendasari keberhasilan capaian kinerja ini adalah masyarakat yang sudah tidak merasa malu untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk lebih dari 2 minggu, penjarangan suspect TB sudah dilakukan secara aktif dan pengetahuan masyarakat tentang penyakit TB sudah sangat luas. Meskipun masih ada kendala dalam keberhasilan ini, yaitu factor ekonomi yang menyebabkan mobilisasi penderita TBC yang harus pindah ke tempat lain untuk mencari pekerjaan yang lebih layak, sehingga menyebabkan pengobatan tidak teratur atau tidak tuntas.
- e. Sasaran strategis Menurunnya Angka Kesakitan pada indikator kinerja prevalensi kusta dengan capaian kinerja sebesar 81,30% atau kategori **CUKUP BERHASIL**. Keberhasilan kinerja sasaran strategis tersebut didukung oleh Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Hal yang mendasari keberhasilan capaian kinerja ini adalah keaktifan lintas sector dalam membantu tenaga kesehatan untuk aktif memberikan informasi masyarakat yang menderita kusta.. Selain itu juga pemeriksaan kontak serumah penderita kusta, pemeriksaan kusta bagi anak sekolah juga sudah dilakukan secara aktif oleh petugas. Meskipun demikian realisasi kinerja yang dicapai (2,33/1.000 penduduk) belum memenuhi target kinerja yang ditentukan (2/1.000 penduduk). Hal ini dikarenakan
-

sebagian masyarakat masih menganggap bahwa penyakit kusta penyakit kutukan, sehingga masyarakat tidak mau dilakukan pemeriksaan.

- f. Sasaran strategis Menurunnya Angka Kesakitan pada indikator kinerja prevalensi hipertensi dengan capaian kinerja sebesar 89,43% atau kategori **SANGAT BERHASIL**. Keberhasilan kinerja sasaran strategis tersebut didukung oleh Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Hal yang mendasari keberhasilan capaian ini adalah adanya perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan oleh petugas kesehatan dan aktifnya posbindu dan posyandu lansia. Meskipun capaian ini termasuk kategori sangat berhasil, tetapi capaiannya masih kurang dari target yang ditentukan yaitu 33% dengan realisasi 36,9%. Hal ini disebabkan anggapan masyarakat yang masih menganggap bahwa hipertensi merupakan penyakit biasa yang mudah disembuhkan, menyebabkan banyak orang dengan hipertensi tidak melakukan pengobatan secara rutin.
 - g. Sasaran strategis Nilai SKM Pelayanan Kesehatan memiliki capaian kinerja sebesar 100,29% atau kategori **SANGAT BERHASIL**. Keberhasilan kinerja sasaran strategis tersebut didukung oleh Program penunjang urusan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya pengukuran SKM ini dilakukan setiap 6 bulan sekali secara online. Hal yang menyebabkan keberhasilan nilai Survey Kepuasan Masyarakat ini adalah pelayanan di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana yang selalu ditingkatkan yang didukung adanya komitmen pelayanan oleh petugas.
 - h. Sasaran strategis Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk melalui pelayanan keluarga berencana dengan indikator kinerja Total Fertility Rate (TFR) memiliki capaian kinerja sebesar 78,1% atau kategori **CUKUP BERHASIL**. Beberapa faktor penyebab capaian indikator ini kurang maksimal dalam pencapaiannya
-

adalah masih rendahnya minat ibu untuk ikut KB. Sebagian besar ibu balita ber-KB secara alami atau tradisional, tentunya angka kegagalan KB ini sangat tinggi, sehingga mempengaruhi angka kelahiran. Selain itu juga adanya persepsi masyarakat yang menganggap banyak anak banyak rejeki. Beberapa upaya yang dilakukan, dari mulai penyuluhan pada masyarakat dengan melibatkan suami dan keluarga dalam penyuluhan atau pemberian pendidikan kesehatan tentang KB serta membuat suatu pembaharuan dalam pembuatan media untuk mensosialisasikan program KB, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan program dengan lebih optimal, , safari KB dan lain sebagainya.

2. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Dalam melakukan pengukuran kinerja dapat dibandingkan dengan capaian yang telah dicapai tahun-tahun sebelumnya. Dengan melakukan perbandingan ini dapat diketahui seberapa banyak rata-rata peningkatan kinerja kita setiap tahunnya. Dengan demikian akan dapat diukur/ diketahui apakah capaian kinerja organisasi yang telah ditentukan dalam renstra dapat dicapai atau tidak diakhir periode renstra.

Pengukuran capaian kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2017-2022

Sasaran/ Indikator Sasaran		Capaian			
		2019	2020	2021	2022
1	Menurunnya Kematian Ibu dan Bayi				
	- Angka Kematian Ibu	66,29	60,54	105,64	74,68
	- Angka Kematian Bayi	5,67	3,99	3,72	3,36
2	Meningkatnya status gizi				
	Prevalensi stunting	9,92	8	6,01	4,61
3	Menurunnya angka kesakitan				
	- Angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) semua kasus TBC	83,8	86,2	83,9	83,73
	- Prevalensi kusta	NA	1,91	1,82	2,46
	- Prevalensi Hipertensi	NA	NA	NA	36,93
4	Nilai IKM				
	- Persentase nilai IKM Pelayanan Kesehatan	82,76	84,76	81,25	86,25
5	Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk melalui pelayanan keluarga berencana				
	Total Fertility Rate	NA	1,99	2,42	2,4

Dari tabel diatas dapat dilakukan analisis sebagai berikut:

- a. Angka kematian ibu dari tahun 2019-2020 mengalami penurunan, tetapi di tahun 2021 mengalami peningkatan kematian ibu yang signifikan yaitu dari 60,54/100.000 KH menjadi 105,64/100.000 KH. Hal ini dikarenakan adanya KLB Covid-19 yang menyebabkan kematian ibu menjadi bertambah. Sedangkan di tahun 2022 terjadi penurunan kembali kematian ibu, seiring dengan kasus covid-19 yang semakin berkurang dan bias ditangani.
- b. Angka kematian bayi dari tahun 2019-2022 mengalami penurunan jumlah kematian bayi meskipun penurunan tiap tahunnya tidak signifikan, tetapi hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dan konsistensi terhadap upaya yang dilakukan untuk menurunkan jumlah kematian bayi. Adapun rata-rata penurunan kematian bayi setiap tahunnya adalah 0,77/1000 KH.
- c. Meningkatnya status gizi dengan indikator prevalensi balita stunting dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan yang signifikan, artinya berdasarkan penilaian

- kinerja mengalami peningkatan kinerja. Adapun rata-rata penurunan prevalensi stunting setiap tahunnya adalah 1,77%
- d. Angka keberhasilan pengobatan (*Success Rate*) semua kasus TBC dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan kinerja, tetapi jika dibandingkan dari tahun 2019-2021 angka capaiannya turun-naik walaupun tidak signifikan, hal ini dikarenakan keberhasilan pengobatan (*Success Rate*) semua kasus TBC tergantung saat itu tuntasnya berobat.
 - e. Capaian prevalensi kusta dibandingkan tahun sebelumnya mengalami kenaikan artinya secara kinerja mengalami penurunan kinerja, tetapi hal ini sebenarnya menunjukkan peningkatan kinerja petugas di lapangan, karena petugas saat ini aktif melakukan pemeriksaan kusta kepada masyarakat dan kasus kusta mengalami peningkatan.
 - f. Prevalensi hipertensi dibandingkan tahun sebelumnya mengalami kenaikan kinerja meskipun tidak signifikan, tetapi sudah menunjukkan trend penurunan setiap tahunnya.
 - g. Nilai IKM pelayanan kesehatan dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan nilai IKM 2,6% pertahun. Sedangkan tahun 2022 mengalami penurunan kinerja, dikarenakan penilaian dilakukan secara online, yang kemungkinan responden kurang paham terhadap item pertanyaan yang diberikan.
 - h. Pada indikator TFR (*Total Fertility Rate*), dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan kinerja, artinya ada peningkatan capaian TFR yang menunjukkan tidak terkendalinya jumlah penduduk melalui program keluarga berencana.
3. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target RPJMD
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan kesehatan
-

di Kabupaten Sampang, Dalam pelaksanaannya diharapkan menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam rangka pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang 2022-2024. Pelaksanaan kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran harus memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar beberapa sumber APBD yang diterima SKPD Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Renstra Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang 2022-2024 merupakan pedoman dan dasar dalam melaksanakan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Sampang. Untuk itu perlu ditetapkan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 3.4 Tabel Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi Capaian Tiap Tahun						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024	
1	Angka Kematian Ibu	91,5	66,29	60,54	105,64	74,68	73	67	67
2	Angka Kematian Bayi	7,02	5,67	3,99	3,72	3,36	5,4	4,88	4,57
3	Persentase stunting	20	9,92	8	6,01	4,61	9	8	8
4	Angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) semua kasus TBC	80	83,8	86,2	83,9	83,73	90	92	92
5	Prevalensi kusta	3,24	NA	1,91	1,82	2,46	1,5	1,25	1,25
6	Prevalensi Hipertensi	36,9	NA	NA	NA	36,93	32	31	31
7	Persentase nilai IKM	82,80	82,76	84,76	81,25	86,25	86	87	88
8	TFR (<i>Total Fertility Rate</i>)	NA	NA	1,99	2,42	2,4	1,9	1,9	1,9

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di tahun pertama RPJMD terdapat beberapa indikator yang kemungkinan bisa dipastikan dapat dicapai sebelum akhir RPJMD.

a. Angka kematian ibu

Diperkirakan target indikator SKM pelayanan kesehatan harus dengan upaya yang keras untuk bisa memenuhi target setiap tahunnya. Mengingat capaian setiap tahunnya turun naik.

b. Angka kematian bayi

Angka kematian Ibu tahun pertama RPJMD telah mencapai 3,36/1.000 kelahiran hidup. Capaian akhir periode RPJMD sebesar 4,57/1.000 kelahiran hidup. Capaian ini sudah mendekati target RPJMD tahun keempat. Sehingga dapat diperkirakan diakhir periode RPJMD indikator AKB ini juga bisa jauh melebihi target akhir RPJMD.

c. Persentase Stunting

Persentase stunting tahun pertama RPJMD telah mencapai 9,92%. Capaian akhir periode RPJMD sebesar 14,5%. Capaian ini sudah melebihi target akhir RPJMD. Sehingga dapat diperkirakan diakhir periode RPJMD indikator persentase stunting ini juga bisa jauh melebihi target akhir RPJMD.

d. Angka keberhasilan pengobatan (*Success Rate*) semua kasus TBC

Indikator ini diperkirakan belum bisa mencapai target di akhir RPJMD. Tahun keempat RPJMD angka capaian yang didapat 83,73%, sedangkan target akhir RPJMD di angka 92%. Untuk perlu adanya rencana-rencana aksi dan inovasi dalam upaya mencapai target akhir RPJMD.

e. Prevalensi Kusta

Indikator ini juga diperkirakan belum bisa mencapai target di akhir RPJMD. Tahun keempat RPJMD angka capaian yang didapat 2,46 per 10.000 penduduk, sedangkan target akhir

RPJMD di angka 1,25 per 10.000 penduduk. Untuk itu perlu dilakukan inovasi dalam upaya mencapai target akhir RPJMD

f. Prevalensi Hipertensi

Indikator ini diperkirakan belum bisa mencapai target di akhir RPJMD. Tahun keempat RPJMD angka capaian yang didapat 36,9%, dimana angka ini sama dengan capaian awal RPJMD, sedangkan target akhir RPJMD di angka 31%. Perlu upaya dan strategi yang tepat untuk bisa mencapai target di akhir RPJMD.

g. Nilai SKM Pelayanan Kesehatan

Diperkirakan target indikator SKM pelayanan kesehatan harus dengan upaya yang keras untuk bisa memenuhi target setiap tahunnya. Mengingat capaian setiap tahunnya turun naik.

4. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target nasional

Dari empat indikator sasaran dengan enam indikator yang telah ditentukan, ada beberapa indikator kinerja yang memiliki target nasional. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target nasional disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.5 Tabel Indikator Kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana yang Mengacu pada Indikator Propinsi dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Target		
		Kabupaten (realisasi 2022)	Propinsi	Nasional
1	Menurunnya kematian ibu dan bayi			
	Angka Kematian Ibu	74,68/100.000 KH	91,45/100.000 KH	205/100.000 KH
	Angka Kematian Bayi	3,36/1.000 KH	13,4/1.000 KH	18,6/1.000 KH
2	Meningkatnya status gizi			
	Persentase stunting	4,61	18,4	24
3	Menurunnya Angka Kesakitan			
	- Angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) semua kasus TBC	83,73	90	90
	- Prevalensi kusta	2,46	0,63/10.000 penduduk	<1/10.000 penduduk

No	Indikator Kinerja	Target		
		Kabupaten (realisasi 2022)	Propinsi	Nasional
	- Prevalensi Hipertensi	36,93	36,32	43
4	Nilai SKM			
	Persentase nilai SKM Pelayanan Kesehatan	86,25		
5	Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk melalui pelayanan keluarga berencana			
	Total Fertility Rate	2,4	2,1	2,1

Dari tabel diatas dapat diketahui seluruh indikator memiliki target propinsi dan nasional, hanya indikator nilai survey kepuasan masyarakat yang tidak memiliki target propinsi dan nasional.

Dari indikator tersebut yang sudah memenuhi target provinsi dan nasional adalah pada indikator AKI, AKB dan prevalensi stunting. Bahkan capaian kabupaten jauh melebihi target propinsi dan nasional yang ditentukan. Sedangkan pada indikator angka *success rate* seluruh kasus TBC, prevalensi kusta, prevalensi hipertensi dan total fertility rate masih jauh belum memenuhi target nasional dan target propinsi.

5. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja maka akan dilakukan beberapa upaya atau rencana tindak lanjut untuk lebih meningkatkan kinerja atau minimal mempertahankan kinerja yang sudah bagus ini. Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan peran aktif lintas sektor secara terpadu dalam program kesehatan untuk peka terhadap kondisi kesehatan lingkungannya dan aktif dalam ikut mendukung program kesehatan, seperti mendukung ibu bersalin ke tenaga kesehatan, ibu dan balita rutin berkunjung ke posyandu dan program kesehatan lainnya.
- b. Melengkapi kebutuhan sarana prasarana di FKTP dan FKTL khususnya sarana prasarana untuk pelayanan ibu bersalin dan

bayi sebagai prioritas utama untuk menurunkan kematian ibu dan bayi.

- c. Perubahan pendekatan menjadi pendekatan keluarga melalui kunjungan rumah aktif oleh tenaga kesehatan khususnya bagi keluarga beresiko (keluarga yang memiliki lansia, bayi, balita, ibu hamil, dan penyakit kronis) serta mendorong keluarga untuk aktif dalam mengikuti kegiatan kesehatan.
- d. Meningkatkan keaktifan Posbindu dan posyandu lansia dalam upaya meningkatkan capaian prevalensi hipertensi.
- e. Meningkatkan penyuluhan pada masyarakat dengan melibatkan suami dan keluarga dalam penyuluhan atau pemberian pendidikan kesehatan tentang KB serta membuat suatu pembaharuan dalam pembuatan media untuk mensosialisasikan program KB, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan program dengan lebih optimal, , safari KB dan lain sebagainya

B. Realisasi Anggaran

Agar dapat mewujudkan target sasaran strategis yang telah ditetapkan, tentunya dibutuhkan anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menunjang upaya pencapaian target sasaran strategis. Besaran anggaran yang menunjang pencapaian sasaran strategis disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.6 Alokasi anggaran program dan kegiatan dalam pencapaian indikator sasaran Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Anggaran		
		Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
1	Menurunnya kematian ibu dan bayi			
a	Angka Kematian Ibu	17.341.961.225	14.725.292.658	84,91
b	Angka Kematian Bayi	3.725.584.827	3.536.796.400	94,93
2	Meningkatnya status gizi			
a	Prevalensi stunting	14.109.772.437	9.900.558.202	70,16

No	Sasaran Strategis	Anggaran		
		Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
3	Menurunnya angka kesakitan			
a	Angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) semua kasus TBC	291.984.230	233.597.933	80,00
b	Prevalensi kusta	3.297.653.440	2.427.536.599	73,61
c	Prevalensi hipertensi	824.790.813	656.416.912	79,58
4	Nilai IKM pelayanan kesehatan			
a	% Nilai IKM pelayanan kesehatan	1.800.569.983	1.694762.782	94,12
5	Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk melalui pelayanan keluarga berencana			
a	TFR (<i>Total Fertility Rate</i>)	3.764.689.031	2.919.148.730	77,54
Jumlah		45.157.005.986	36.094.110.216	79,93

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penyerapan anggaran program/kegiatan yang mendukung indikator utama sebesar 79,93%. Sedangkan alokasi anggaran terbesar adalah pada sasaran menurunnya kematian ibu dan bayi pada indikator angka kematian ibu, yaitu sebesar Rp. 17.341.961.225 atau 38,40% dari total anggaran dengan realisasi 84,91%. Alokasi anggaran terendah adalah pada indikator sasaran Angka keberhasilan pengobatan (*Success Rate*) semua kasus TBC, yaitu sebesar Rp. 824.790.813 atau 0,64% dari total anggaran dan terealisasi sebesar 73,61%.

Selanjutnya akan dilakukan pengukuran tingkat efisiensi penggunaan anggaran. Pengukuran tingkat efisiensi ini merupakan selisih capaian realisasi kinerja dengan capaian realisasi keuangan pada sasaran strategis. Berikut ini tingkat efisiensi masing-masing sasaran strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang pada Tahun 2022.

Tabel 3.7 Tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja sasaran Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Kategori
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian		
1	Menurunnya Kematian Ibu dan Bayi								
a	Angka Kematian Ibu	73	74,68	97,75	17.341.961.225	14.725.292.658	84,91	115,12	Sangat efisien
b	Angka Kematian Bayi	5,4	3,36	160,71	3.725.584.827	3.536.796.400	94,93	169,29	Sangat efisien
2	Meningkatnya Status Gizi								
a	Prevalensi stunting	10	4,61	216,92	14.109.772.437	9.900.558.202	70,16	309,18	Sangat efisien
3	Menurunnya angka kesakitan								
a	Angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) semua kasus TBC	88	83,73	95,15	291.984.230	233.597.933	80,00	118,94	Sangat efisien
b	Prevalensi kusta	2	2,46	81,30	3.297.653.440	2.427.536.599	73,61	110,45	Sangat efisien
c	Prevalensi hipertensi	33	36,9	89,43	824.790.813	656.416.912	79,58	112,38	Sangat efisien
4	Nilai SKM pelayanan kesehatan								
a	% Nilai SKM pelayanan kesehatan	86	86,25	100,29	1.800.569.983	1.694.762.782	94,16	106,51	Sangat efisien
5	Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk melalui pelayanan keluarga berencana								
a	TFR (Total Fertility Rate)	1,9	2,4	78,51	3.764.689.031	2.919.148.730	77,54	98,76	Sangat efisien

Berdasarkan tabel diatas secara keseluruhan jika dibandingkan antara capaian kinerja yang dihasilkan dengan anggaran yang diserap adalah efisien dalam penggunaan anggaran, artinya bahwa nilai realisasi anggaran lebih kecil dibandingkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. Hal ini dikarenakan dalam menentukan kegiatan benar-benar dipilih kegiatan yang memberikan pengaruh langsung terhadap capaian kinerja sasaran strategis, sehingga anggaran yang digunakan pun akan efisien.

Sedangkan berdasarkan DPA Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang Tahun 2022 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, anggaran dan realisasi pelaksanaan DPA Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang sebagai berikut:

Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi PAD Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang Tahun 2022

No.	Uraian	Capaian Kinerja		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Pendapatan	160.889.000.221,00	163.437.373.324,27	101,58
a.	Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas	15.674.200.000,00	13.640.699.530,00	87,02
b.	Retribusi Pelayanan Kesehatan RSD Ketapang	10.000.000.000,00	6.390.612.184,00	63,9
c.	Dana Kapitasi JKN Puskesmas	48.620.647.126,00	50.881.016.350,00	104,64
d.	Pendapatan BLUD	102.268.353.095,00	106.165.744.790,27	103,81
2.	Belanja	233.141.576.149,00	191.311.459.984,46	82,06

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pendapatan bidang kesehatan Kabupaten Sampang diperoleh dari sumber Dana retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit, kapitasi JKN Puskesmas dan BLUD Rumah Sakit. Retribusi pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk biaya operasional rutin Puskesmas, pendapatan Kapitasi JKN dimanfaatkan oleh Puskesmas sebagai belanja Jasa Pelayanan Medis dan Jasa Operasional Puskesmas melalui DPA Puskesmas masing-masing. Sedangkan pendapatan BLUD dibelanjakan oleh Rumah Sakit untuk kegiatan-kegiatan Rumah Sakit yang tidak dianggarkan melalui DAU serta untuk belanja pegawai Rumah Sakit termasuk untuk membayar gaji pegawai BLUD.

Pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang didukung oleh Program dan Kegiatan yang telah direncanakan. Kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan didukung oleh realisasi keuangan yang baik oleh masing-masing bidang dan seksi. Berikut ini realisasi keuangan Program dan Kegiatan di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang pada Tahun 2022.

Tabel 3.9 Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang Tahun 2022

NO	URAIAN	ALOKASI BIAYA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
	BELANJA LANGSUNG			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	82.420.523.037,00	76.709.801.786,00	93,07%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140.467.233,00	127.451.919,00	90,73%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	93.342.233,00	81.358.487,00	87,16%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.000.000,00	8.963.990,00	99,60%

NO	URAIAN	ALOKASI BIAYA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.300.000,00	4.838.492,00	91,29%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.425.000,00	9.372.750,00	99,45%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.675.000,00	6.277.000,00	94,04%
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.725.000,00	16.641.200,00	99,50%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80.619.953.054,00	75.015.039.004,00	93,05%
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	80.611.901.413,00	75.013.268.004,00	93,05%
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.065.547,00	-	0,00%
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.986.094,00	1.771.000,00	35,52%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	494.066.792,00	457.086.686,00	92,52%
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.303.380,00	29.283.669,00	99,93%
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.839.107,00	52.460.842,00	95,66%
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95.842.605,00	82.642.268,00	86,23%
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	94.137.800,00	91.527.440,00	97,23%
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.680.000,00	6.895.000,00	89,78%
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	212.263.900,00	194.277.467,00	91,53%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	278.042.658,00	277.855.000,00	99,93%
16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00%
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	158.042.658,00	157.855.000,00	99,88%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	512.243.300,00	472.484.973,00	92,24%
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.275.000,00	-	0,00%

NO	URAIAN	ALOKASI BIAYA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	258.468.300,00	234.984.973,00	90,91%
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	252.500.000,00	237.500.000,00	94,06%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	375.750.000,00	359.884.204,00	95,78%
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	178.000.000,00	165.019.186,00	92,71%
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.800.000,00	73.865.018,00	97,45%
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	121.950.000,00	121.000.000,00	99,22%
B	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	134.760.530.360,00	102.996.842.689,46	76,43%
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	17.930.743.567,00	16.589.073.155,00	92,52%
24	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	718.256.220,00	706.810.453,00	98,41%
25	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	0,00%
26	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.287.658.737,00	5.340.474.842,00	84,94%
27	Pengadaan Obat, Vaksin	7.090.667.863,00	6.902.471.684,00	97,35%
28	Pengadaan Bahan Habis Pakai	3.679.995.403,00	3.501.804.876,00	95,16%
29	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	154.165.344,00	137.511.300,00	89,20%
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	116.329.993.128,00	85.944.124.329,46	73,88%
30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.567.433.639,00	1.353.044.256,00	86,32%
31	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.097.299.422,00	284.980.123,00	25,97%
32	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	45.589.424,00	34.991.524,00	76,75%
33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	304.433.035,00	246.309.750,00	80,91%

NO	URAIAN	ALOKASI BIAYA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	546.157.514,00	470.973.595,00	86,23%
35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	45.991.284,00	41.061.936,00	89,28%
36	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	238.600.245,00	197.100.176,00	82,61%
37	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	43.262.500,00	39.214.200,00	90,64%
38	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	13.077.500,00	13.042.000,00	99,73%
39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	166.575.340,00	147.821.665,00	88,74%
40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	291.984.230,00	233.597.933,00	80,00%
41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	146.324.279,00	99.173.178,00	67,78%
42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	5.520.419.754,00	4.444.011.523,00	80,50%
43	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.569.855.826,00	3.249.016.599,00	91,01%
44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	496.936.784,00	379.040.600,00	76,28%
45	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	827.050.464,00	720.399.202,00	87,10%
46	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.081.430.231,00	896.464.162,00	82,90%
47	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	619.852.863,00	435.002.710,00	70,18%
48	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	233.502.278,00	160.835.000,00	68,88%
49	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3.297.653.440,00	2.427.536.599,00	73,61%
50	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	75.391.292.197,00	54.808.361.962,46	72,70%
51	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	224.437.846,00	191.558.938,00	85,35%
52	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	426.480.000,00		0,00%
53	Operasional Pelayanan Puskesmas	18.875.855.858,00	14.483.471.036,00	76,73%
54	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	208.343.516,00	206.357.875,00	99,05%

NO	URAIAN	ALOKASI BIAYA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
55	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	561.831.696,00	1.320.000,00	0,23%
56	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	488.321.963,00	379.437.787,00	77,70%
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	499.793.665,00	463.645.205,00	92,77%
57	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	329.329.165,00	298.226.049,00	90,56%
58	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	133.301.000,00	128.866.856,00	96,67%
59	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	37.163.500,00	36.552.300,00	98,36%
C	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	4.639.426.200,00	4.559.830.823,00	98,28%
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	24.998.763,00	24.733.023,00	98,94%
60	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	24.998.763,00	24.733.023,00	98,94%
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	4.614.427.437,00	4.535.097.800,00	98,28%
61	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	4.562.637.000,00	4.484.557.800,00	98,29%
62	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	51.790.437,00	50.540.000,00	97,59%
D	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	268.290.509,00	228.589.254,00	85,20%
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	137.639.126,00	120.798.970,00	87,76%
63	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	137.639.126,00	120.798.970,00	87,76%

NO	URAIAN	ALOKASI BIAYA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	21.736.383,00	17.631.250,00	81,11%
64	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	21.736.383,00	17.631.250,00	81,11%
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	108.915.000,00	90.159.034,00	82,78%
65	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	108.915.000,00	90.159.034,00	82,78%
E	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.137.094.370,00	1.872.372.207,00	87,61%
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	760.674.879,00	693.487.110,00	91,17%
66	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	760.674.879,00	693.487.110,00	91,17%
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	472.515.774,00	390.737.045,00	82,69%
67	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	472.515.774,00	390.737.045,00	82,69%
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	903.903.717,00	788.148.052,00	87,19%
68	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	903.903.717,00	788.148.052,00	87,19%
F	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	147.199.751,00	112.052.760,00	76,12%
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	147.199.751,00	112.052.760,00	76,12%

NO	URAIAN	ALOKASI BIAYA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
69	Perumusan Parameter Kependudukan	14.999.751,00	6.595.960,00	43,97%
70	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	5.000.000,00	4.994.600,00	99,89%
71	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	127.200.000,00	100.462.200,00	78,98%
G	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.617.489.280,00	2.807.095.970,00	77,60%
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	922.973.040,00	533.184.263,00	57,77%
72	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.374.654,00	4.308.000,00	98,48%
73	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000,00	22.949.900,00	91,80%
74	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	70.636.000,00	66.117.014,00	93,60%
75	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	215.998.896,00	124.110.000,00	57,46%
76	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	566.989.000,00	300.097.199,00	52,93%
77	Pengendalian Program KKBPK	39.974.490,00	15.602.150,00	39,03%
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.004.533.008,00	1.668.513.307,00	83,24%
78	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	536.400.000,00	421.200.000,00	78,52%
79	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	892.800.000,00	874.920.000,00	98,00%
80	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	21.634.463,00	13.579.800,00	62,77%

NO	URAIAN	ALOKASI BIAYA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
81	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	406.633.540,00	222.319.500,00	54,67%
82	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	100.766.000,00	99.817.999,00	99,06%
83	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	9.576.616,00	2.486.400,00	25,96%
84	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	28.184.982,00	27.166.148,00	96,39%
85	Peningkatan Kesertaan KB Pria	8.537.407,00	7.023.460,00	82,27%
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	689.983.232,00	605.398.400,00	87,74%
86	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	689.983.232,00	605.398.400,00	87,74%
H	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.151.022.642,00	2.024.874.495,00	39,31%
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5.151.022.642,00	2.024.874.495,00	39,31%
87	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	513.000.000,00	496.534.000,00	96,79%
88	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	53.419.940,00	32.284.063,00	60,43%
89	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4.469.480.000,00	1.387.490.000,00	31,04%
90	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	15.157.000,00	14.676.000,00	96,83%

NO	URAIAN	ALOKASI BIAYA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
91	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	99.965.702,00	93.890.432,00	93,92%
JUMLAH TOTAL		233.141.576.149,00	191.311.459.984,46	82,06%

*Anggaran Setelah Perubahan

Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis yang diharapkan telah dilaksanakan 23 Program dan 93 Kegiatan yang secara keuangan realisasinya rata-rata 82,06%. Persentase realisasi ini termasuk kategori baik.

C. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi

Beberapa upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Rekomendasi Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2022	Tindak Lanjut
A. Perencanaan Kinerja		
I. Perencanaan Kinerja Tahunan		
1	Perencanaan kinerja agar berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading kinerja)	Telah dilakukan perbaikan cascading kinerja
2	Penyusunan rencana kerja dan anggaran agar mengacu pada dokumen renstra	Tetap berdasarkan renstra untuk indikator kinerja, tetapi untuk penganggaran tidak sepenuhnya mengacu pada renstra, sesuai dengan kondisi kesehatan tahun berjalan dan Tahun N+1, mengingat kondisi/kasus kesehatan sangat dinamis
3	Meningkatkan komitmen pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) mulai dari setingkat eselon IV keatas dengan memanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment	Proses integrasi antara pohon kinerja dalam SAKIP dengan Pohon kinerja dalam SKP
B. Pengukuran Kinerja		
1	Kualitas pengukuran	

	Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja secara berjenjang dari level staf hingga level tertinggi	Meningkatkan komitmen petugas dalam validasi data melalui aplikasi sistem informasi data dan website
2	Implementasi pengukuran Memonitor pencapaian target kinerja eselon III dan IV	Sudah dilakukan evaluasi secara rutin setiap bulan untuk monitoring pencapaian target eselon III dan IV
C. Pelaporan Kinerja		
1	Dalam laporan kinerja menyajikan informasi sesuai standart dan informasi yang disajikan agar digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja	Sudah dilakukan
D. Evaluasi Internal		
1	Lakukan pemantauan rencana aksi untuk memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan	Akan dilakukan pemantauan rencana aksi untuk mengendalikan kinerja sebagai upaya akselerasi pencapaian kinerja
2	Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk peningkatan implementasi SAKIP	Sudah dilakukan

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang Tahun 2022 merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi, alat pertanggungjawaban, dan peningkatan kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang. Setiap Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang telah mengimplementasikan dan mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan hasil evaluasi internal baik secara triwulanan dan tahunan yang telah disusun dalam LKjIP Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang Tahun 2022 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Sasaran strategis pada indikator Angka Kematian Ibu capaian kinerjanya yaitu 97,75% atau kategori SANGAT BERHASIL
 2. Sasaran strategis pada indikator Angka Kematian Bayi capaian kinerjanya yaitu 160,71% atau kategori SANGAT BERHASIL
 3. Sasaran strategis Meningkatnya Status Gizi dengan indikator Prevalensi Balita Stunting capaian kinerjanya yaitu 216,92% atau kategori SANGAT BERHASIL
 4. Sasaran strategis menurunnya angka kesakitan dengan indikator Angka keberhasilan (*success rate*) semua kasus TBC capaian kinerjanya yaitu 95,15% atau kategori SANGAT BERHASIL
 5. Sasaran strategis menurunnya angka kesakitan dengan indikator prevalensi kusta capaian kinerjanya yaitu 81,30% atau kategori CUKUP BERHASIL
 6. Sasaran strategis menurunnya angka kesakitan dengan indikator prevalensi hipertensi capaian kinerjanya yaitu 89,43% atau kategori SANGAT BERHASIL
-

7. Sasaran strategis Nilai SKM Pelayanan Kesehatan capaian kinerjanya yaitu 100,29% atau kategori SANGAT BERHASIL
8. Sasaran strategis Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk melalui pelayanan keluarga berencana dengan indikator TFR (*Total Fertility Rate*) capaian kinerjanya yaitu 78,51% atau kategori CUKUP BERHASIL

Sedangkan berdasarkan efisiensi antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis pada indikator Angka Kematian Ibu tingkat efisiensi belanjanya sebesar 115,2% dan dikategorikan SANGAT EFISIEN.
 2. Sasaran strategis pada indikator Angka Kematian Bayi tingkat efisiensi belanjanya sebesar 169,29% dan dikategorikan SANGAT EFISIEN.
 3. Sasaran strategis Meningkatnya Status Gizi dengan indikator Prevalensi Balita Stunting tingkat efisiensi belanjanya sebesar 309,18% dan dikategorikan SANGAT EFISIEN.
 4. Sasaran strategis Menurunnya Angka Kesakitan dengan indikator Angka keberhasilan (*success rate*) semua kasus TBC tingkat efisiensi belanjanya sebesar 118,94% dan dikategorikan SANGAT EFISIEN.
 5. Sasaran strategis Menurunnya Angka Kesakitan dengan indikator Prevalensi kusta tingkat efisiensi belanjanya sebesar 110,45% dan dikategorikan SANGAT EFISIEN.
 6. Sasaran strategis Menurunnya Angka Kesakitan dengan indikator Prevalensi hipertensi tingkat efisiensi belanjanya sebesar 112,38% dan dikategorikan SANGAT EFISIEN.
 7. Sasaran strategis Nilai SKM Pelayanan Kesehatan tingkat efisiensi belanjanya sebesar 106,51% dan dikategorikan SANGAT EFISIEN.
 8. Sasaran strategis Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk melalui pelayanan keluarga berencana dengan indikator TFR (*Total Fertility Rate*) tingkat efisiensi belanjanya sebesar 98,76% dan dikategorikan SANGAT EFISIEN.
-

Dalam pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari hambatan dan kendala yang dijumpai baik bersifat internal maupun eksternal. Oleh karena itu akan dilakukan upaya peningkatan kinerja di lingkup Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang, pembangunan budaya kerja yang kondusif, penegakan disiplin pegawai, dan mengoptimalkan setiap sumber daya yang dimiliki dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang Tahun 2022-2024.

Sampang, 28 Februari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN DAN
KELUARGA BERENCANA dan KB
KABUPATEN SAMPANG



dr. ABDULLOH NAJICH, Sp.P.,MM

Pembina

NIP. 19750421 200604 1 012
